

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998: 75-76).

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan

adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998: 76).

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998: 76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan

kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke

waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Rahardjo Adisasmita, 2006: 34). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan) (Rahardjo Adisasmita, 2006: 35).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi).

Efektifitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target (yang direncanakan), juga rasio tersebut lebih besar dari satu berarti efektif, dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu maka berarti tidak efektif. Efisiensi dimaksudkan jika dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi, dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

Menurut Diana Conyers (1991: 154-155), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek dinegara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga,

partisipasi menjadi *urgen* karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Berangkat dari paparan diatas menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni* terhadap keberlanjutan program pembangunan, dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali. Pendek kata, dengan pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka ketrampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka.

Mengingat *urgennya* partisipasi dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar harus melibatkan warga. Dalam proses pembangunan ekonomi desa, warga masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai objek, tetapi harus menjadi subjek dalam menentukan perkembangan masyarakat, dengan demikian, jika warga masyarakat melakukan penolakan terhadap investasi, maka pemerintah juga tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Partisipasi pada hakekatnya merupakan bentuk peningkatan posisi tawar-menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik kapital. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar (Suparjan dan Hempri, 2003: 54). Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan agar jangan sampai proses pembangunan yang dilakukan ataupun masuknya investor dari luar justru meminggirkan peran ekonomi masyarakat lokal (Suparjan dan Hempri, 2003: 55). Berkaitan dengan hal ini perlu adanya regulasi-regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan dan perlindungan pada masyarakat lokal. Termasuk dalam konteks ini adalah kearifan lokal,

tradisi-tradisi lokal, maupun potensi-potensi lokal yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial pembangunan.

Sebenarnya, banyak para pakar yang telah memberikan definisi partisipasi ini. Sebagian pakar, mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok tersebut, sedangkan Mubyarto (1996: 67), mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. dari dua definisi diatas, sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya proses sebuah masyarakat mobilisasi rakyat.

Eugen C. Erickson (1974, dalam Suparjan dan Hempri, 2003: 58-60), mengungkapkan lebih jelas tentang konsep partisipasi. Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki pada komunitas (*sense of belonging to the lives people*). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam *labeling an identity* (pelabelan pada identitas mereka) sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar, dari pemikiran tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (seperti: hubungan dengan pemerintah ataupun dengan komunitas masyarakat lainnya).

Pada partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu (1) identifikasi permasalahan dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun pemegang kebijakan otoritas tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, *brain storming*, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. (2) proses perencanaan dimana masyarakat dilibatkan identifikasi, (3) pelaksanaan proyek pembangunan, (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti proses dari evaluasi ini. (5) Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan dan (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan, dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain itu satu hal yang juga penting dalam konsep partisipasi adalah bahwasannya partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata. Selama ini, ada kesan bahwa partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata. Selama ini ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi ketika dia sudah terlibat secara fisik, seperti ikut kerja bakti, ikut menghadiri penyuluhan. Padahal, esensi yang terkandung dalam partisipasi, sebenarnya tidak sesempit itu. Hal inilah yang kemudian juga mengakibatkan konsep partisipasi sekedar dimaknai sebagai keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara materi.

Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dan menyukseskan jalannya pembangunan. Hal demikian juga menafikan partisipasi dalam bentuk non materi, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah (Suparjan dan Hempri, 2003: 69). Dengan demikian, menjadi hal yang wajar ketika pada hakikatnya proses pembangunan yang dilakukan cenderung menguntungkan masyarakat lapisan atas, sementara kepentingan masyarakat lapisan bawah cenderung diabaikan.

C. Teori Perubahan Sosial

Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial,

norma-norma sosial , pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

William F.Ogburn, berusaha memberikan sesuatu pengertian tertentu , walau tidak memberi definisi tentang definisi perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan social meliputi unsur – unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial yang ditekankan ialah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial (William F. Ogburn, 1964 dalam Soerjono Soekanto, 2007: 262).

Menurut Selo Soemardjan, mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan perubahan pada lembaga lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan 1962 dalam Soerjono Soekanto, 2007: 263). Perubahan social adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dan masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain.

Menurut Agus Salim dalam bukunya *Perubahan Sosial Sketsa dan Refleksi* menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya seleksi alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Setiap manusia pasti

mengalami suatu perubahan, baik perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif, dan perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap pribadi manusia itu sendiri (Agus Salim: 2002: 1). Secara umum gambaran mengenai perubahan sosial sangat luas, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat terjadi mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya setiap masyarakat dalam hidupnya akan mengalami suatu perubahan. Perubahan itu akan dapat diketahui, apabila dilakukan suatu perbandingan, artinya adalah menelaah keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan kemudian membandingkan dengan keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan masyarakat pada waktu yang lalu.

Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus (Taneko, 1984: 133). Artinya, bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan itu, akan tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama, ada masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, 1987

dalam Piotr Sztomka, 2010: 5). Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu (Farley, 1990 dalam Piotr Stztomka, 2010: 5).

Setiap masyarakat dalam hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Salah satu Teori Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons mengenai Perubahan. Pandangan Parsons mengenai perubahan yang dimaksudkan yaitu untuk lebih memahami proses perubahan. Parsons menginginkan agar keseimbangan selalu terjaga, antara lain dengan jalan mengeliminasi berbagai sumber konflik (Poerwanto Hadi, 1993: 25-26). Parsons mendasarkan pandangannya pada konsep stabilitas atau ekuilibrium yang dianggap ciri utama suatu sistem.

Suatu struktur sosial, hubungan terpola merupakan bagian dari unsur normatif. Unsur-unsur tersebut berasal dari berbagai pandangan berbagai kesatuan yang tercermin dalam tingkah laku masyarakat yang dianggap benar atau sebaliknya. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam suatu sistem sosial selain bersifat normatif, pola hubungan sistem sosial ini juga melembaga dikalangan masyarakat.

Dari gambaran umum para tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori perubahan sosial terletak pada perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat atau stabilitas masyarakat. Objek atau ruang lingkup dari perubahan sosial

tersebut meliputi unsur-unsur geografis, ekonomi maupun kebudayaan, dan sifat dari perubahan sosial tersebut adalah bersifat periodik dan non periodik.

a. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Bentuk perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan lambat adalah Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat atau dinamakan evolusi. Perubahan cepat adalah perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat.

2) Perubahan kecil dan perubahan besar

Perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 269-274).

- 3) Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan didalam masyarakat.

- 4) Perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak dikehendaki.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial:

- 1) faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosigenik artinya masyarakat itu sendiri yang merupakan sumber perubahan sosial, masyarakat disini dapat bersifat kolektif maupun individual, faktor internal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi faktor internal manifest/ yang disengaja (*intended*) dan laten/ tidak disengaja (*unintended*).
- 2) Faktor eksternal faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat diluar masyarakat yang menyebabkan terjadinya

perubahan sosial, misal kependudukan, perubahan lingkungan, penjajahan atau agama.

D. DESA WISATA

Pengertian Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Departemen Pariwisata, 1999: 14).

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari ke khasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dsb.) sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis, yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya (Ika Putra, 2007 dalam Ratna Sari, 2010: 27). Dari definisi tersebut, konsep dari suatu desa wisata yakni menunjukkan kekhasn lokal yang mampu dikomersilan sebagai daya tarik seorang wisatawan.

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang antara yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Anonim Pariwisata, <http://.id.wikipedia.desa.wisata>, diunggah pada tanggal 14 Oktober 2012, pukul 14.00). Pembentukan desa wisata biasanya dikarenakan desa tersebut mempunyai ciri khas, daya tarik yang mampu dikomersilkan. Menurut tipe pengelolaan desa wisata dapat dibagi menjadi:

- a. Tipe terstruktur (*Enclave*) ditandai dengan karakter sebagai berikut:
 1. Lahannya terbatas namun dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik sehingga sering digunakan sebagai unsur utama dalam usaha pelayanan hotel berbintang.
 2. Lokasi biasanya terpisah dengan masyarakat lokal, sehingga dapat diminimalisir terjadinya pencemaran budaya lokal.
- b. Tipe terbuka (*Spontaneus*)

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal sehingga sulit dikendalikan. Bertolak dari tipe pengelolaannya, desa wisata juga mempunyai beberapa komponen utama. Komponen tersebut antara lain:

- a. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk akomodasinya berupa sebagian dari tempat

tinggal para penduduk setempat/unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

- b. Atraksi merupakan pertunjukkan atau tontonan yang meliputi seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa wisata yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain lain yang spesifik (<http://id.wikipedia.org/wiki/desa.wisata>, diunggah pada tanggal 14 Oktober 2012, pukul 14.00)

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Maisaroh pada tahun 2011, yakni mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2007. Adapun penelitian tersebut berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Rumah Pintar Pijoengan di Dusun Daraman, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta”. Penelitian yang ia lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui “Rumah Pijoengan” yang berada di Dusun Daraman.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Begitu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pentingsari, namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh lebih terfokus

pada bagaimana Rumah Pijoengan yang ada di Dusun Daraman memberdayakan masyarakat sekitar, dampak pemberdayaan dan bagaimana hasil yang dicapai dari program pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Pijoengan sedangkan peneliti menekankan bagaimana proses pemberdayaan yang ada di Desa Wisata Pentingsari, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat adanya pemberdayaan di Desa Wisata Pentingsari dan dampak yang terjadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pentingsari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Maisaroh menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada di rumah pintar Pijoengan bersifat edukasi. Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian pelatihan ketrampilan, pengarahan dan pengawasan dengan didukung berbagai fasilitas yang ada. Banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan warga masyarakat dapat lebih sejahtera dari sebelumnya, dengan adanya peningkatan ketrampilan yang ada. Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang mereka miliki, mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat yang maju dan lebih modern. Hasil dari adanya pemberdayaan yang diadakan oleh rumah pintar pijoengan sudah hampir sesuai dengan tujuan utama yang ingin diwujudkan. Rumah pintar pijoengan ini memberikan hasil yang sangat

diterima oleh masyarakat karena mereka menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna, berkualitas, berwawasan luas dan berpengalaman. Pola pikir masyarakat sekitar rumah pintar pijoengan menjadi lebih terbuka, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berbekal dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka dapat selama dirumah pintar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari Endang Dwi, Mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM pada tahun 2010 yang berjudul “Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi Kasus tentang Strategi Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Ketingan Tirtodadi Mlati Sleman)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari Endang Dwi menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan format studi kasus. Teknik penelitian menggunakan observasi , dokumen dan wawancara mendalam.

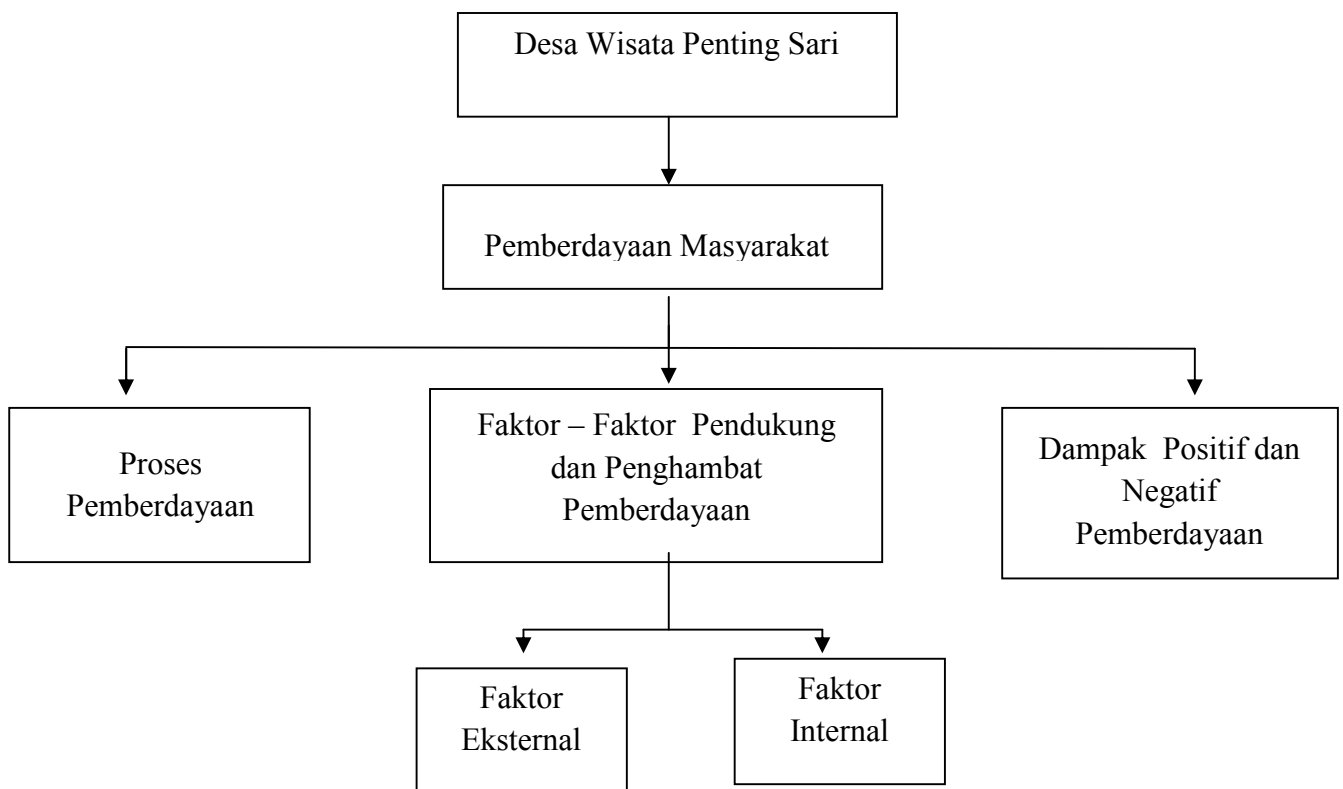
Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat, dan sama-sama melakukan penelitian di Desa Wisata, namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh saudari Ratna lebih fokus pada bagaimana perbedaan strategi yang dilakukan oleh masyarakat yang pro dan kontra dalam rangka pengembangan desa wisata ketinggian terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, perbedaan pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang pro dan kontra untuk mendukung pengembangan desa wisata dan konsekuensi pemanfaatan

modal sosial yang berbeda tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat adanya pemberdayaan dan dampak adanya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Pentingsari. Tempat penelitiannya pun berbeda walau sama-sama meneliti Desa Wisata. Saudari Ratna melakukan penelitian di Desa Wisata Ketingan Mlati Sleman, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di desa wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Ratna menunjukkan bahwa adanya kelompok-kelompok yang sangat kontradiktif terutama dalam pengembangan desa wisata, yakni kelompok pro dan kontra akan adanya desa wisata. Bagi masyarakat yang pro desa wisata tentu saja melakukan hal yang mendukung kegiatan pengembangan wisata, sedangkan masyarakat yang kontra desa wisata melakukan tindakan yang mengakibatkan kemunduran desa wisata. Kosekuensinya adalah stagnasi pengembangan desa wisata dikarenakan usaha partisipasi masyarakat tidak sebaik ketika dahulu semua masyarakat pro untung mengembangkan desa wisata. Pemanfaatan modal sosial yang berbeda tersebut mengakibatkan perbedaan strategi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan materi dari kedatangan pengunjung.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wisata Pentingsari, ingin mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wisata Pentingsari dan ingin mengetahui dampak positif dan negatif dari pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Pentingsari.



Bagan 1 Kerangka Pikir